

# PERILAKU POLITIK PEMILIH MASYARAKAT PERKOTAAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2009

Irtanto \*)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pada pemilu legislatif 2009, mengetahui penyebab mereka golput serta mengidentifikasi isu-isu politik dan prioritas program yang menarik pemilih. Merupakan penelitian melalui pendekatan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pilihan politik mereka antara lain faktor sosiologis berupa latar belakang agama, faktor psikologis berupa kedekatan emosional, kesalehan kandidat, popularitas kandidat, performen, integritas diri kandidat. Kemudian faktor-faktor rasionalitas berupa pengalaman kandidat, status pendidikan, kalangan profesional, iklan politik, dan kredibilitas kandidat. Sedangkan yang menjadi penyebab golput di antaranya faktor kepercayaan pada kandidat dan rendahnya kepercayaan pada pihak pemerintah. Isu-isu politik dan prioritas program yang menarik pemilih antara lain reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan, kepastian hukum, pemberantasan KKN, lapangan kerja, dan pengangguran

Kata kunci : *Perilaku Legislatif*

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, partai-partai peserta pemilu selalu berubah-ubah. Pada pemilu pertama 1955 diikuti 172 kontestan Partai Politik. Empat partai terbesar hasil pemilu tersebut adalah PNI (22,3%), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%). Pemilu 1971 diikuti sepuluh kontestan. Pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh tiga kontestan yang sama yaitu, Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia<sup>1</sup>. Pemilu legislatif 1999 di masa reformasi diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 diikuti pula multi partai yaitu sebanyak 24 partai politik. Pemilu legislatif di Indonesia selama 9 kali

tersebut di atas rakyat hanya memilih partai politik.

Pemilu legislatif 2009 yang diikuti oleh 34 partai politik sangat berbeda dengan pemilu periode sebelumnya yang selalu memilih tanda gambar parpol. Selain itu yang menentukan jadi tidaknya seseorang menjadi anggota legislatif baik yang ada di pusat maupun di daerah adalah parpol. Pada pemilu 2009, pemilih dapat memilih partai politik maupun dapat memilih calon kandidat. Karena itu, parpol maupun kandidat harus bekerja serius mendekati pemilih. Tidak jarang terjadi, kandidat berupaya mendekati para pemilih dengan cara-cara yang melanggar hukum semisal

\*) Peneliti politik dan pemerintahan pada Balitbang Provinsi Jawa Timur

1) Pelaksanaan pemilu selama orde baru, partai politik direduksi oleh pihak pemerintah menjadi 3 partai politik dengan tujuan antara lain untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

## Definisi dan Operasionalisasi Konsep

Perilaku politik adalah respon terhadap nilai-nilai politik yang dipengaruhi persepsi karena kondisi sosiologis, psikologis, dan rasionalitas seseorang. Variabel perilaku politik dilihat pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.

- a. Variabel sosiologis dapat dilihat dari indikator dari karakteristik sosiologis dapat dilihat latar belakang demografi, pekerjaan pemilih, pendidikan, agama, wilayah/daerah, jenis kelamin, umur, kelas, sosial ekonomi. Karakteristik demografis yang meliputi ikatan kedaerahan, keluarga dan status ekonomi.
- b. Variabel psikologis dapat dilihat dari indikator dari pendekatan psikologis adalah ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi mereka terhadap isu-isu program, orientasi terhadap kandidat.
- c. Variabel pendekatan rasional dengan indikator isu-isu politik yang menguntungkan dirinya, kandidat yang diajukan yang menguntungkan dan didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi di bidang masing-masing dan dari mana media informasi prestasi di bidang masing-masing.

Demikian juga indikator pilihan rasional bisa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, kualitas kandidat, kompetensi dan integritas kandidat,

kepribadian, gaya hidup, performa dari partai maupun kandidat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Kota Surabaya, Kota Probolinggo dan Kota Blitar. Kota Surabaya akan mewakili budaya arek yaitu kota Malang dan Mojokerto, Kota Probolinggo mewakili budaya pendalungan yaitu Kota Pasuruan, sedangkan Kota Blitar mewakili budaya mataraman yang meliputi Kota Kediri dan Kota Madiun. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah memiliki hak-hak politik dalam pemilihan legislatif 2009. Pendekatan penelitian yang kami gunakan untuk melihat perilaku pemilih pemilu 2009 ini adalah kualitatif (Keith F.Punch, 1998). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologi yang berusaha untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi pada pemilu legislatif 2009.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan instrumen daftar pertanyaan (kuesioner) tertutup dan terbuka kepada masyarakat yang mempunyai hak politik pada pemilu legislatif 2009. Sedangkan metode penentuan sampel dengan sistem kuota sampling atas dasar mereka mempunyai hak-hak politik dalam Pemilu legislatif 2009 sebanyak 600 orang. Adapun sasaran pendistribusian kuesioner dalam penelitian ini adalah para pemilih yang terpilih dengan mempertimbangkan penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif, maka pengambilan sample menggunakan sistem acak.

## Definisi dan Operasionalisasi Konsep

Perilaku politik adalah respon terhadap nilai-nilai politik yang dipengaruhi persepsi karena kondisi sosiologis, psikologis, dan rasionalitas seseorang. Variabel perilaku politik dilihat pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.

- a. Variabel sosiologis dapat dilihat dari indikator dari karakteristik sosiologis dapat dilihat latar belakang demografi, pekerjaan pemilih, pendidikan, agama, wilayah/daerah, jenis kelamin, umur, kelas, sosial ekonomi. Karakteristik demografis yang meliputi ikatan kedaerahan, keluarga dan status ekonomi.
- b. Variabel psikologis dapat dilihat dari indikator dari pendekatan psikologis adalah ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi mereka terhadap isu-isu program, orientasi terhadap kandidat.
- c. Variabel pendekatan rasional dengan indikator isu-isu politik yang menguntungkan dirinya, kandidat yang diajukan yang menguntungkan dan didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi di bidang masing-masing dan dari mana media informasi prestasi di bidang masing-masing.

Demikian juga indikator pilihan rasional bisa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, kualitas kandidat, kompetensi dan integritas kandidat,

kepribadian, gaya hidup, performa dari partai maupun kandidat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Kota Surabaya, Kota Probolinggo dan Kota Blitar. Kota Surabaya akan mewakili budaya arek yaitu kota Malang dan Mojokerto, Kota Probolinggo mewakili budaya pendalungan yaitu Kota Pasuruan, sedangkan Kota Blitar mewakili budaya mataraman yang meliputi Kota Kediri dan Kota Madiun. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah memiliki hak-hak politik dalam pemilihan legislatif 2009. Pendekatan penelitian yang kami gunakan untuk melihat perilaku pemilih pemilu 2009 ini adalah kualitatif (Keith F. Punch, 1998). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologi yang berusaha untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi pada pemilu legislatif 2009.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan instrumen daftar pertanyaan (kuesioner) tertutup dan terbuka kepada masyarakat yang mempunyai hak politik pada pemilu legislatif 2009. Sedangkan metode penentuan sampel dengan sistem kuota sampling atas dasar mereka mempunyai hak-hak politik dalam Pemilu legislatif 2009 sebanyak 600 orang. Adapun sasaran pendistribusian kuesioner dalam penelitian ini adalah para pemilih yang terpilih dengan mempertimbangkan penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif, maka pengambilan sample menggunakan sistem acak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Cara Memilih dan Perbedaan Jenjang Pilihan

Masyarakat pemilih di perkotaan seperti Probolinggo, Surabaya dan Blitar kebanyakan memilih langsung kandidat anggota legislatif (79,0%), dan mereka yang tidak memilih sebanyak 21,0%. Mereka yang tidak memilih bermacam-macam alasan antara lain tidak terdaftar dalam DPT. Ada juga yang meski terdaftar namun mereka enggan atau tidak mau untuk menggunakan hak pilihnya. Alasannya, karena tidak banyak membawa perubahan Indonesia kedepan, dan berpendapat bahwa yang paling berpengaruh terhadap perubahan adalah presiden bersama eksekutifnya. Karena itu mereka yang tidak memilih pada saat pemilu legislatif akan memilih pada saat pemilihan presiden.

Cara mereka memilih pada pemilu legislatif 2009 kebanyakan mencontreng satu nama atau nomor calon anggota legislatif (90,9%). Sedangkan mereka yang mencontreng satu tanda gambar atau nomor parpol hanya sedikit sekali (6,4%), demikian juga mereka yang memilih atau pencontreng parpol dan calon anggota legislatif dari partai yang berkesesuaian hanya 2,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka lebih senang memilih orang daripada parpol. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kandidat dituntut dekat dengan rakyat.

Realitasnya masyarakat kota di tiga daerah penelitian yaitu baik di Kota Surabaya, Probolinggo maupun Kota Blitar bervariasi dalam menentukan pilihannya antara anggota DPRD Kota, DPRD Propinsi maupun DPR Pusat. Pilihan mereka

berbeda antara anggota DPRD Kota dengan DPR propinsi maupun DPR Pusat (29,2%). Ada pula dari mereka memilih anggota DPRD Kota yang berbeda dengan pilihan DPR Propinsi (21,1%). Demikian pula ada sebagian kecil pilihan mereka berbeda antara anggota DPRD Kota dengan DPR Pusat (1,8%). Pilihan mereka ada kecenderungan berbeda antara DPR yang satu dengan DPR lainnya (52,1%). Namun demikian, pilihan mereka ada pula pilihan anggota DPRD Kota yang sama dengan DPR Propinsi maupun DPR Pusat (22,2%). Tidak itu saja pilihan mereka ada pula yang sama antara anggota DPRD kota dengan DPR Propinsi (8,8%), demikian pula pilihan mereka ada yang sama antara anggota DPRD Kota dengan DPR Pusat (1,8%).

### Memilih Partai Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang ikut berpengaruh dalam memilih partai politik. Mereka memilih partai demokrat kebanyakan (68,6%) karena pengaruh pigur pemimpinnya yaitu SBY (Susilo Bambang Yudoyono). Sedangkan mereka yang memilih Partai Demokrat karena programnya yang bagus hanya 20,6% saja, dan mereka yang memilih partai demokrat karena dianggap bersih maupun karena pengalamannya tidak kita temui sama sekali.

Mereka memilih Partai Golkar kebanyakan dipengaruhi oleh karena program kampanyenya dianggap bagus (69,1%), namun ada pula mereka\* memilihnya karena dipengaruhi oleh pigur pemimpinnya yang dianggap baik (11,8%)

dan ada pula mereka yang memilih partai Golkar tidak memberi alasan apa-apa. Nampaknya para pemilih PDIP tidak jauh berbeda dengan pemilih partai Golongan Karya (Golkar). Mereka memilih PDI-P ada kecenderungan karena dipengaruhi oleh program-programnya dianggap baik (59,8%), namun ada pula mereka memilihnya karena pigur pimpinan partai politiknya (20,6%) dan ada pula pemilih tidak memberi alasan (19,6%). Tetapi mereka yang memilih PDI-P karena dianggap bersih ataupun dianggap berpengalaman untuk memimpin bangsa ini tidak dijumpai sama sekali.

Sangat berbeda dengan para pemilih partai politik yang berasal dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Nampak sekali mereka memilih PKS karena partai tersebut dianggap bersih dari KKN (64,5%) dan ada pula karena pigur pimpinan partai politiknya (20,6%). Namun mereka tidak ada memilih PKS dipengaruhi oleh karena program kampanye ataupun karena dianggap partai yang berpengalaman. Selanjutnya pemilih PAN ada kecenderungan (50,5%) dianggapnya karena program kampanye yang ditawarkan cukup baik dan memberi harapan di masa depan. Ada pula memilih partai tersebut karena dipengaruhi oleh pigur pemimpinya (10,7%), dipengaruhi oleh orang lain (2,8%), bahkan ada yang menganggap partai tersebut dipandang berpengalaman (25,5%).

Bagaimana mereka yang memilih PKB? Mereka ada yang menganggap program partai tersebut usulannya baik (40,6%), ada pula yang menganggapnya bersih (20,6%), bahkan memilih karena ikut-

ikutan orang lain (23,5%). Agak berbeda dengan pemilih PPP. Mereka memilih PPP ada kecenderungan dianggap banyak pengalamannya (53,5%). Memang partai tersebut berdiri sejak orde baru sehingga dengan demikian partai tersebut dipandang banyak pengalamannya dan tetap eksis dari waktu ke waktu. Ada pula sebagian lainnya memilihnya karena dipengaruhi oleh usulan program kampanye yang cukup menjanjikan (30,0%). Namun ada pula mereka memilih partai tersebut dipengaruhi oleh orang lain atau ikut-ikutan (10,5%).

Mereka ada kecenderungan memilih Partai Hanura walaupun tidak dominan jumlahnya, karena dipengaruhi oleh karena program kampanye partai tersebut baik (41,2%). Namun ada pula mereka memilih partai tersebut karena pengaruh pigur seseorang (21,2%), karena pengaruh orang lain (21,8%), bahkan ada yang menganggapnya bersih atau baik (1,8%). Untuk partai Gerindra, mereka memilih partai tersebut ada kecenderungan karena dipengaruhi oleh karena pigur Prabowo (41,8%), bahkan program-program partainya juga ikut berpengaruh terhadap perilaku pemilih sehingga mereka memilihnya (40,5%). Namun diantara pemilih ada pula yang berpandangan bahwa Partai Gerindra dianggap cukup bersih orang-orangnya walaupun partai tersebut baru saja berdiri dan baru ikut pemilu 2009 (5,6%). Ada pula pemilih perkotaan yang masih kurang rasional, mereka memilih partai tersebut karena pengaruh orang lain atau karena ikut-ikutan (5,7%).

### **Alasan Memilih Golput (Golongan Putih)**

Mereka yang tidak memilih pada pemilu legislatif tersebut mempunyai alasan yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. Di antara mereka yang tidak memilih tersebut yang paling banyak beralasan bahwa memilih atau tidak memilih sama saja (65,0%) tidak akan banyak berubah. Hal ini menunjukkan sikap apatisisme mereka terhadap sistem politik yang berlaku, mereka ada kecenderungan tidak peduli dengan pemilu tersebut, dan mereka tidak yakin kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan hasil pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa mereka yang terpilih menjadi anggota dewan yang bersangkutan tidak akan berjuang untuk rakyat.

Selain itu mereka tidak memilih pada pemilu legislatif 2009 ada yang karena tidak tertarik pada calon manapun, para kandidat tidak menjanjikan atau tidak menarik (5,0%). Mereka ada pula yang beralasan mengapa tidak memilih dikarenakan mereka menganggap tidak ada alternatif pilihan kandidat manapun yang dapat dipercaya (10,0%). Demikian pula mereka beranggapan seperti hasil pemilu yang lalu pada tahun 2004 dalam realitasnya mereka tidak berjuang untuk perbaikan kondisi bangsa atau perbaikan nasib rakyat, malahan yang mereka perjuangkan kebanyakan kepentingan dirinya.

Mereka ada pula yang beralasan tidak memilih karena tidak cocok dengan sistem pemilu yang diikuti oleh banyak partai politik (5,0%), dan mereka ada pula yang tidak memilih dikarenakan program-

program yang ditawarkan oleh partai politik maupun oleh para kandidat tidak memenuhi harapan/tidak menjanjikan akan perbaikan kedepan buat rakyat. Namun mereka ada pula tidak memilih karena mereka tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (30,0%).

Dari sekian banyak diantara mereka yang tidak terdaftar pada pemilih tetap pada pemilu 2009 bersikap protes pada panitia pemilihan (33,3%), ada pula mereka yang melapor pada panitia pengawas, bahkan ada sebagian besar diantara mereka ada pula yang bersikap acuh tak acuh atau membiarkan saja/tidak tahu menahu, tidak ambil pusing (57,5%).

### **Pendapat Pemilih tentang Kualitas SDM Kandidat**

Pada umumnya penilaian pemilih pada pemilu legislatif 2009 terhadap DPR Pusat tentang sumber daya manusianya (SDM) kebanyakan dinilai sudah baik (43,3%). Namun ada pula mereka yang menilainya kurang baik (18,1%), tidak baik (1,2%), bahkan mereka ada yang tidak tahu menahu soal sumber daya manusia DPRRI (37,4%).

Penilaian pemilih terhadap kualitas DPRD Provinsi Jawa Timur, tidak jauh berbeda dengan penilaian pemilih politik terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) DPRRI. Mereka ada yang menilai kualitas SDM DPRD Propinsi relatif cukup baik (36,5%), namun mereka ada sebagian besar menilai kualitasnya kurang baik (46,3%), tidak baik (4,7%), bahkan mereka banyak pula yang tidak tahu menahu soal kualitas DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dari sekian banyak pemilih politik pemilu legislatif 2009 mayoritas mereka menilai kualitas DPRD Kota masih kurang baik (50,3%). Walaupun demikian mereka ada sebagian yang menilai kualitas SDM kandidat anggota DPRD Kota sudah baik (10,4%). Bahkan ada pula sebagian yang menilai tidak baik (24,7%). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa rakyat sekarang ini sudah semakin kritis terhadap situasi yang ada di lingkungannya sendiri. Apalagi pemilihan umum legislatif 2009 memilih langsung orang, jauh berbeda dengan pemilu legislatif sebelumnya yang memilih partai politik.

Kondisinya berbeda dengan penilaian pemilih terhadap kandidat DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pemilih politik pada pemilu legislatif 2009 sebagian besar tidak dapat memberi penilaian apakah kandidat anggota DPD tersebut berkualitas atau tidak. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan sebagian besar (45,0%) tidak tahu menahu persoalan SDM kandidat anggota DPD (Dewan Perwakilan daerah). Demikian pula sebaliknya mereka yang menilai kualitas SDM kandidat anggota DPD baik tidak begitu banyak, hanya sebesar 21,1%, sedangkan mereka yang menilainya kurang baik hanya 31,0% dan yang menilai kualitasnya tidak baik 29,0%. Kondisi hasil penelitian seperti ini terutama persoalan mereka yang tidak tahu tentang kualitas DPD jumlahnya yang cukup besar menunjukkan bahwa masyarakat pemilih pada pemilu legislatif 2009 masih asing dengan wakilnya yang akan duduk di DPD.

## Media Pengenalan

Program kampanye pemilu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, apalagi kandidat/calon anggota legislatif. Di era pemilihan langsung peran media pengenalan baik itu media cetak, elektronik, maupun media-media lainnya menjadi sangat penting artinya. Oleh karena itu para kandidat sangat berkepentingan dengan media pengenalan. Dari sekian banyak media ternyata masyarakat perkotaan terutama pemilih pemilu legislatif 2009 mengenal atau tahu dengan kandidat DPRRI lebih banyak dari iklan televisi (79,5%) dan selain dari televisi mereka juga mengenalnya lewat selebaran/papan baliho, umbul-umbul (53,8%).

Menurut pengakuan pemilih, mereka mengenal kandidat anggota DPRD lebih banyak lewat selebaran/papan baliho, umbul-umbul (62,0%). Selain mereka mengenal lewat selebaran juga lewat iklan televisi (28,5%) terutama televisi lokal. Namun untuk kandidat anggota DPRD mereka mengenal program-programnya lebih cenderung lewat selebaran/papan baliho, umbul-umbul.

Selain media televisi yang nampak efektif dapat digunakan untuk kampanye para kandidat anggota DPR pusat naupun DPRD Provinsi dan DPRD Kota adalah media selebaran/papan baliho, dan umbul-umbul. Hal ini terbukti dari hasil penelitian mereka mengenal kandidat DPRRI/pusat sebanyak 53,8%, demikian juga mereka mengenal ataupun tahu DPRD Provinsi lewat media selebaran/papan baliho, umbul sebanyak 62,0%. Bahkan untuk DPRD Kota mereka mengenal

kandidat tersebut kebanyakan lewat media selebaran/papan baliho, umbul-umbul sebanyak 81,3%.

Dari sekian media tersebut surat kabar atau koran lokal maupun nasional masih banyak diminati oleh pemilih. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemilih mengenal atau tahu kandidat anggota DPRRI/Pusat sebanyak 21,6%, DPRD Provinsi sebanyak 35,7% dan DPRD Kota sebanyak 32,7%. Sedangkan media lainnya seperti kampanye rapat umum cenderung tidak diminati oleh pemilih perkotaan. Mereka mengenal kandidat lewat kampanye rapat umum untuk DPRRI hanya sebanyak 4,1%, DPRD Provinsi sebesar 5,3% dan DPRD Perkotaan hanya 16,4%. Untuk perkumpulan warga nampaknya lebih efektif sebagai media pengenalan kandidat (47,0%).

## **FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PILIHAN POLITIK**

### **Faktor Sosiologis**

Faktor latar belakang agama, apakah itu ketaatan agamanya, sikap dalam mengaplikasikan agamanya dalam kehidupan sehari-hari ternyata masih menjadi pertimbangan dalam memilih anggota legislatif baik itu legislatif pusat (DPRRI), propinsi maupun legislatif Kota. Kondisi ini dapat dilihat bahwa mayoritas pemilih (51,7%) mempertimbangkan latar belakang agama calon legislatif yang dipilihnya. Namun mereka cenderung tidak mempertimbangkan dari latar belakang profesi tertentu (59,2%). Demikian juga mereka cenderung tidak mempertimbangkan kesamaan jenis kelamin (60,1%). Walaupun demikian ada sebagian

kecil yang mempertimbangkan gender (19,2%) para calon anggota legislatif baik itu untuk legislatif pusat (DPRRI), DPRD Propinsi, maupun Kota. Demikian pula calon legislatif yang berasal dari daerah/asli daerah ternyata cenderung tidak menjadi pertimbangan utama (58,0%). Walaupun demikian masih ada sebagian kecil yang mempertimbangkan calon legislatif yang berasal/asli dari daerah (13,4%). Demikian juga dengan calon legislatif yang berasal dari keturunan pemimpin baik itu pemimpin formal dalam pemerintahan maupun pemimpin keagamaan cenderung (60,9%) tidaklah menjadi pertimbangan. Tidak jauh berbeda calon anggota legislatif yang berasal dari pemuka agama cenderung tidak mempengaruhi pilihan politik mereka (67,4%).

Perilaku politik pemilih legislatif tahun 2009 mempunyai kecenderungan pula tidak dipengaruhi (58,6%) oleh saran dan informasi dari keluarga (ayah, ibu) mereka terutama pemilih politik pemula ataupun golongan usia muda. Walaupun demikian tidaklah semuanya seperti itu, ada pula sebagian kecil (19,9%) yang dipengaruhi oleh saran dan informasi dari keluarganya. Demikian pula saran dan informasi dari saudara kandungpun, teman maupun saran dari tokoh agama cenderung tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya baik itu DPRRI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kota.

Secara sosiologis perilaku politik pemilih cenderung banyak dipengaruhi oleh sikap kandidat dalam pergaulan yaitu mereka bersikap sopan, menghargai orang

yang lebih tua maupun orang muda. Selain itu mereka cenderung (78,5%) mempertimbangkan tingkat pendidikan calon anggota legislatif. Demikian pula mereka cenderung (72,7%) mempertimbangkan teman dalam organisasinya. Namun teman dalam organisasi tidak mutlak pasti dipilih, teman organisasi tersebut dipilih perilaku dalam kehidupan sehari-harinya harus baik mempunyai kompetensi dan integritas diri. Hal lain yang cenderung tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik mereka antara lain teman alumni (48,7%).

### Faktor Pilihan Psikologis

Perilaku politik pemilih cenderung dipengaruhi oleh kedekatan hubungan emosional seperti keluarga, kekerabatan dan lainnya (68,0%) sedangkan sebanyak 22,2% menyatakan tidak mempertimbangkannya.

Pada realitasnya walaupun seorang kandidat berasal sederhana dengan pemilih tidak selamanya mempengaruhi perilaku politik pemilih. Perilaku politik mereka cenderung (64,5%) tidak mempertimbangkan kesamaan latar belakang asal daerahnya, justru yang cukup berpengaruh terhadap pilihan mereka kebanyakan karena kesalahannya (87,3%). Tidak hanya soal kesalahannya, yang mempengaruhi perilaku mereka juga soal integritas diri kandidat legislatif tersebut (81,4%). Hal ini berarti jika integritas dirinya baik akan dipilihnya. Selain itu penampilan fisik seperti kecantikan, ketampanan seorang kandidat menjadi pertimbangan dalam menentukan pemilihannya (56,3%). Selain

pertimbangan kesalehan, integritas diri, penampilan fisik para kandidat juga pertimbangan psikologis seperti popularitas mereka menjadi salah satu menjadi pertimbangan untuk dipilihnya (61,5%). Tidak kalah pentingnya yang berpengaruh terhadap pilihan politik mereka ternyata kandidat harus mempunyai performen/penampilan dalam berpakaian, kerapian dan keanggunan mereka.

Perilaku politik pemilih dipengaruhi pula oleh soal minat yang sama dengan pemilihnya (51,5%?). Perilaku politik mereka secara psikologis juga dipengaruhi oleh kedekatan secara personal, bila kandidat anggota legislatif kenal secara personal, teman sahabat cenderung dipilihnya (49,9%). Walaupun mereka yang menyatakan mempertimbangkan kandidat yang kenal secara personal (sahabat, teman dan lain sebagainya) tidak dominan, namun hal ini paling tidak menunjukkan bahwa hubungan personal masih mempengaruhi pilihan politik mereka.

Pilihan politik pemilih tidak dipengaruhi oleh asal daerah kandidat anggota legislatif baik itu pusat (DPRI), propinsi maupun legislatif Kota. Demikian juga mereka cenderung tidak menjadi pertimbangan apakah kandidat anggota legislatif tersebut berasal dari politisi/partai politik atau tidak (66,3%). Demikian juga ada kecenderungan (60,4%) jabatan formal dalam organisasi parpol tidak begitu berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih.

### Faktor Pilihan Rasional

Rasionalitas seseorang akan menentukan pilihan politik terhadap kandidat tertentu. Oleh karena itu pilihan politik mereka tidak lepas dari sejauhmana tingkat rasionalitas seseorang. Kandidat anggota legislatif yang berpengalaman untuk memimpin organisasi dijadikan salah satu pertimbangan untuk dipilihnya (66,2%). Selain itu, status pendidikan tinggi kandidat anggota legislatif cenderung (73,3%) dijadikan pertimbangan untuk dipilih. Demikian juga kandidat anggota legislatif yang berasal dari kalangan profesional mempunyai kecenderungan (62,1%) dijadikan pertimbangan oleh pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Namun untuk kandidat yang berasal dari kalangan pengusaha atau mereka yang memiliki status ekonomi tinggi tidak mempunyai pengaruh kuat terhadap pilihan politik pemilih (60,4%). Selain itu, juga para pemilih cenderung tidak mempertimbangkan kandidat yang berasal dari mantan kalangan birokrat/pemerintahan. Kondisi ini menandakan ada kecurigaan terhadap mantan kalangan birokrasi/pemerintahan.

Kandidat dari kalangan intelektual oleh para pemilih menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan politik (70,5). Tidak hanya faktor intelektual kandidat saja yang dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih, selain itu isu-isu kampanye, visi dan misi kandidat juga mempengaruhi perilaku politik pemilih dalam menentukan pilihan politiknya (86,7%). Kredibilitas kandidat (91,3%), program kerja kandidat yang jelas yang dianggap sesuai dengan kebutuhan rakyat (90,2%)

dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya. Ada kecenderungan pula yang menjadi pertimbangan untuk dipilih adalah karena kualitas SDM (94,9%). Demikian juga persoalan gaya hidup kandidat yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan bersahaja cenderung mempengaruhi perilaku politik pemilih (84,9%).

Selain itu, yang mempengaruhi perilaku politik pemilih antara lain karena kandidat mempunyai performa kinerja yang baik, kapabilitas (95,5%). Kinerja partai selama ini mempengaruhi perilaku mereka dalam memilih (70,9%), sedangkan mereka yang tidak mempertimbangkannya hanya 9,4% dan mereka sama tidak tahu menahu persoalan itu sebanyak 19,7%. Selain itu prestasi pemimpin partai dan kader partai selama ini menjadi salah satu pilihan politik mereka (53,3%). Walaupun mereka kenal ataupun tahu dengan kandidat belum tentu mereka akan dipilih calon tersebut. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 58,7% menyatakan tidak mempertimbangkan begitu saja untuk dipilihnya kandidat tersebut. Sedangkan mereka yang menyatakan mempertimbangkan mereka yang kenal atau tahu hanya sebesar 25,7%.

Kemudian persoalan kecendekiawanan kandidat nampak ada kecenderungan mempengaruhi perilaku politik mereka (57,4%), namun mereka ada sebagian yang tidak terpengaruh soal intelektualitas kandidat (30,5%). Faktor popularitas calon juga ikut berpengaruh terhadap pilihan politik mereka. Demikian juga kedekatan kandidat dengan keberhasilan dalam memimpin organisasi

menjadi rujukan pula dalam menentukan pilihan politiknya (53,8%). Hal lain yang ikut mempengaruhi perilaku politik adalah faktor kedekatan dengan rakyat kecil (81,8%). Selain itu kandidat yang menguntungkan secara ekonomi dipilih 49,3%.

### **IKLAN POLITIK DAN PRIORITAS PROGRAM YANG MENARIK**

Program-program kampanye yang dipandang menarik antara lain di bidang birokrasi berupa reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat (76,3%). Kemudian mereka yang menyatakan program di bidang birokrasi tidak menarik hanya sebagian kecil saja (5,8%). Sedangkan mereka yang menyatakan tidak tahu menahu persoalan program kampanye di bidang birokrasi sebanyak 18,7%.

Realitasnya tidak semua pemilih politik tertarik pada program kesehatan yang ditawarkan oleh kandidat anggota legislatif. Mereka yang menyatakan tertarik bidang kesehatan terutama pada perbaikan sarana/prasarana, biaya kesehatan murah danutamakan pasien hanya 31,6%, sedangkan mereka yang lainnya menyatakan program tersebut tidak menarik sebesar 36,3%, bahkan sebanyak 40,1% menyatakan tidak tahu menahu.

Program kampanye yang dipandang menarik oleh pemilih politik juga pada program pendidikan, yaitu pendidikan murah/gratis, perbaikan mutu pendidikan yang selama ini dianggap masih jauh ketinggalan dengan negara-negara lain, peningkatan sumber daya manusia (SDM) guru kedepan dan peningkatan

kesejahteraan aparaturnya seperti mendorong penyelesaian sertifikasi dan lain-lainnya (88,9%). Kondisi ini menggambarkan bahwa program pendidikan kemungkinan besar berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih untuk memilih kandidat tertentu.

Program kampanye yang cukup menarik dan mempengaruhi perilaku politik pemilih antara lain adalah program di bidang hukum terutama tentang kepastian hukum, pemberantasan KKN, ketertiban dan peningkatan kesadaran hukum (79,5%). Program lain yang dipandang menarik adalah program kampanye di bidang pertanian/ekonomi misalnya soal harga murah, permasalahan stabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas pertanian, persoalan kemiskinan, dan pengangguran/lapangan kerja, serta kesenjangan sosial. Sedangkan program kampanye yang dianggap tidak menarik adalah isu tentang stabilitas keamanan, kriminalitas.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pilihan politik ada kecenderungan memilih kandidat daripada parpol. Sedangkan pilihan setiap jenjang berbeda dengan pilihan DPRD Kota, Propinsi maupun DPR R. Sebagian besar masyarakat dalam memilih tidak ditentukan oleh asal parpol tetapi lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Perilaku politik banyak dipengaruhi oleh figur, program dan nilai parpol tertentu yang dianggap bersih.

Mereka yang bersikap golput ada kecenderungan berpendapat bahwa memilih tidak memilih sama saja, dianggap

tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Mereka yang golput karena tidak terdaftar dalam DPT lebih memilih bersikap membiarkan saja/tidak tahu menahu. Pandangan mereka terhadap kualitas SDM kandidat bervariasi. Ada kecenderungan kandidat DPRRI dipandang kualitasnya baik. Lain halnya dengan kualitas kandidat DPRD Propinsi mereka tidak tahu menahu atau tidak dapat memberi penilaian. Hal yang sama terjadi terhadap penilaian kualitas DPD (Dewan Perwakilan Daerah) pemilih tidak dapat memberi penilaian terhadap kualitas mereka. Sedangkan kandidat anggota DPRD Kota cenderung dipandang masih kurang baik.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pilihan politik mereka antara lain faktor sosiologi, psikologis dan faktor rasional. Faktor sosiologis adalah latar belakang agama, sikap kandidat dalam pergaulan seperti kesopanan, menghargai orang yang lebih tua maupun orang muda. Demikian pula usia calon legislatif, pendidikan seorang calon dan teman dalam organisasi mempengaruhi perilaku mereka dalam memilih. Sedangkan faktor psikologis adalah kedekatan emosional (keluarga, kekerabatan), kesalehan kandidat, popularitas kandidat (artis dan sebagainya), performen/penampilan dalam berpakaian), penampilan fisik (kecantikan, ketampanan), integritas diri kandidat, mempunyai minat yang sama dengan pemilih, mengenal secara personal. Faktor-faktor rasionalitas yang mempengaruhi perilaku politik mereka antara lain pengalaman kandidat untuk

memimpin organisasi, status pendidikan tinggi, kandidat berasal dari kalangan profesional, isu-isu kampanye/iklan politik yang dikampanyekan, kredibilitas kandidat, visi dan misi kandidat, program kerja kandidat, kualitas SDM kandidat, gaya hidup yang sederhana, mempunyai performa yang menarik, kinerja dan citra partai, kencedikiawanan, dan kandidat yang mempunyai kedekatan dengan rakyat kecil.

Program kampanye yang menarik antara lain reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan, di bidang pendidikan misalnya pendidikan murah/gratis, perbaikan mutu, peningkatan SDM guru, di bidang hukum seperti kepastian hukum, pemberantasan KKN, ketertiban, peningkatan kesadaran hukum, di bidang pertanian/ekonomi seperti harga murah, stabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas, kemiskinan, lapangan kerja, pengangguran, kesenjangan sosial. Dan bidang keamanan seperti stabilitas keamanan, serta kriminalitas. Pemilih berpendapat bahwa sebaiknya partai politik peserta pemilu tidak diikuti oleh banyak partai politik akan lebih baik kalau diikuti oleh tiga partai politik saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afiti, Subhan dkk, 2005, *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Fisis UPN "Veteran".
- Anwar, M. Khoirul dkk. 2006. *Perilaku Partai Politik Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, Malang: Universitas Muhammadiyah

- Bambang Ilkobar, Saptopo, 2005, *Pemilihan Kepala daerah Langsung, Hubungan Kepala daerah dengan DPRD, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, dalam Subhan Afiti (Editor), Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Yogyakarta, FISIP UPUN "Veteran".*
- Depari, Eduard dan Mac Colin, Andrews (Ed), 1995. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.*
- Franklin, Mark N., "Voting Behavior", dalam Seymour Martin Lipset, 1995. *The Encyclopedia of Democracy, Volume IV (Washington, DC: Congressional Quarterly Inc.*
- Gafar, Afan, 1999, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*
- Huda, Ni'matul, 2004. *"Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung di Era Otonomi Luas, dalam Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran, Yogyakarta, UII Pres.*
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada Masa Transisi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*
- Liliweri, Alo, 1991. *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat. Bandung, Citra Aditya Bakti.*
- Mc. Quali, Denis and Seven Weindahl, 1995. *Model-Model Komunikasi, Jakarta, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*
- Mubarok, M. Mufti, 2005, *Sukses Pilkada, Surabaya, Java Pustaka.*
- Mc Quail, Dennis, 1996, *Teori Komunikasi Massa, Jakarta, Erlangga.*
- Nimmo, Dan, 1989. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Bandung, Rosdakarya.*
- .....1993, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung, Rosdakarya*
- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik di Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru. Bandung, Remaja Rosdakarya.*
- Prihatmoko, Joko J, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filsafat, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*
- Putra, Fadillah, 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Rakhmat, Jalahuddin, 1998. *Psikologi Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Rosadi, Udi, 1999. *"Teori dan Model Penelitian Efek Agenda Setting Media Masa", Jakarta, makalah Pendidikan dan Latihan Penelitian Deppen RI*
- Sanit, Arbi, 2005, *Sistim Politik Indonesia: Kestabilan, Peta, Kekuatan Politik dan Pembangunan, Jakarta: Raja Grafindo Persada*
- Surbakti, Ramlan . 1992. *Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widiasarana.*
- Thalhah M, 2004. *"Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Garansi Moral dan Demokrasi?, dalam Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran, Yogyakarta, UII Pres.*

Tempointeraktif, PNS Kediri Terlibat Pilkada  
Akan Dipecat, [http://www.  
tempointeraktif.com/hg/ nusa/  
jawamadura/2008/01/25](http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2008/01/25).

Upe, Ambo, 2008. *Sosiologi Politik  
Kontemporer, Kajian Tentang  
Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di  
Era Pemilihan Kepala Daerah Secara  
Langsung*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang  
Pemerintahan Daerah.